BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Otonomi Daerah 1999, hlm. 94). Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kunci pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien dan efektif adalah perencanaan, koordinasi, dan keterpaduan antar sektor. Pembangunan sektor tersebut dilakukan di masing-masing daerah sesuai dengan keadaan, kondisi, dan potensi yang dimiliki.

Propinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari delapan Kabupaten dan dua Kota ini tentunya memiliki potensi sumberdaya untuk dapat mencukupi kebutuhan

wilayahnya, baik itu sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang tentunya sangat dibutuhkan peranannya dalam mengelola sumberdaya alam yang tersedia.

Sumatera Selatan bisa dikatakan sebagai daerah pertanian, sebab pertanian memberikan andil besar bagi perekonomian di daerah ini, dimana dari total luas lahan yang tersedia di Sumatera Selatan, lebih dari 60 dari luas lahan yang tersedia digunakan oleh sektor pertanian.

Kemudian disusul oleh perkebunan, dimana tiga besar komoditas perkebunan besar yang menghasilkan produksi perkebunan tertinggi adalah komoditas karet, kopi, dan kelapa sawit. Secara ekonomi, tanaman-tanaman tersebut mampu memberikan andil cukup besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat, dengan kontribusi cukup tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Begitu pula sumberdaya kehutanan, peternakan dan perikanan yang patut diperhitungkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah melaksanakan kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk menyelaraskan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemajuan antar daerah, melalui pembangunan serasi dan terpadu antar sektor pembangunan daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah.

Secara makro pertumbuhan atau kenaikan PDRB dari tahun ke tahun merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan daerah, dimana dalam hal ini PDRB dikategorikan dalam berbagai sektor ekonomi, yaitu :

1. Sektor Pertanian.
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian.
3. Sektor Industri Pengolahan.
4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih.
5. Sektor Bangunan.
6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran.
7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi.
8. Sektor Keuangan, Persewaan bangunan, dan Jasa Perusahaan.
9. Sektor Jasa-jasa.

Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peran setiap sektor-sektor ekonomi tersebut diatas. Besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil perencanaan serta pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
PDRB Propinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan 1993
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1997-2001 (Jutaan Rupiah)

Kabupaten/Kota	1997	1998	1999	2000	2001
1. Ogan Komering Ulu	1.293.123,00	1.215.306,00	1.229.220,00	1.290.260,00	1.364.178,00
2. Ogan Komering Ilir	1.096.522,00	1.047.565,00	1.071.933,00	1.102.472,00	1.148.012,00
3. Muara Enim	2.074.328,00	2.076.756,00	1.932.536,00	2.299.039,00	2.063.755,00
4. Lahat	818.440,00	808.041,00	820.914,00	637.836,00	666.032,00
5. Musi Rawas	882.379,00	824.166,00	649.800,00	672.999,00	484.172,00
6. Musi Banyuasin	2.302.173,00	2.243.359,00	2.340.853,00	2.485.629,00	1.096.176,00
7. Bangka	1.208.169,00	2.923.740,00	3.057.914,00	3.219.205,00	3.376.046,00
8. Belitung	422.443,00	1.138.713,00	1.176.745,00	-	-
9. Palembang	3.301103,00	405.058,00	411.187,00	-	-
10. Pangkal Pinang	188.366,00	183.580,00	186.596,00	-	-

Sumber: BPS Propinsi DIY, PDRB Sumatera Selatan Tahun 1997-2001

Tabel 1.1 dapat memberikan gambaran atas keberhasilan di setiap daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dalam melaksanakan strategi perencanaan pembangunan daerah masing-masing terlihat pada pertumbuhan PDRB. Ketimpangan pertumbuhan PDRB menunjukkan bahwa dibutuhkan perencanaan pembangunan yang matang untuk menyongsong Otonomi Daerah. Daerah dituntut secara aktif untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuannya sendiri tanpa tergantung dari pemerintah pusat.

Dalam menyongsong Otonomi Daerah, Kota Palembang yang terdiri dari delapan Kecamatan dan lima Desa ini tentunya sejak Otonomi Daerah berlaku,

secara aktif menggiatkan pembangunan di daerahnya dengan memaksimalkan potensi sumberdaya yang dimilikinya. Kota Palembang yang kaya akan sumberdaya perikanan, minyak bumi dan batubara yang diharapkan pada masa yang akan datang dapat menjadi sektor ekonomi unggulan dalam meningkatkan pembangunan di daerahnya. Tentu saja hal ini tidak lepas dari peran sumberdaya manusianya untuk dapat mengolah dan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia secara efektif dan efisien. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan yang merupakan faktor penting guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berarti pula dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Jika pertumbuhan ekonomi setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dapat ditingkatkan, hal tersebut tentunya sangat mendukung adanya peningkatan PDRB Propinsi Sumatera Selatan. Berikut ini pada tabel 1.2 dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Selatan, yang ditunjukkan oleh kenaikan PDRB tiap tahun kecuali untuk tahun 1998, dimana hal ini disebabkan oleh adanya krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1999 dan tahun 2000, bangsa Indonesia masih mengalami krisis, tetapi sudah mulai menyesuaikan dengan tahun 1998 (mengalami kenaikan kembali).

Tabel 1.2
PDRB Propinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan 1983 dan 1993, Tahun 1991-2001 (Jutaan Rupiah)

Tahun	Total PDRB
1991	5.057.747
1992	5.307.857
1993	10.736.165
1994	11.515.291
1995	12.515.761
1996	13.567.726
1997	14.207.488
1998	13.239.321
1999	13.659.787
2000	14.468.495
2001	13.109.609

Sumber: BPS Propinsi DIY, PDRB Sumatera Selatan Tahun 1991-2001

Keterangan: - tahun 1991-1992, berdasarkan harga konstan 1983
- tahun 1993-2001, berdasarkan harga konstan 1993

Dari tabel diatas harus dilihat kembali untuk menginstropeksi perencanaan dan strategi pembangunan masing-masing, sekaligus agar mengevaluasi setiap pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat mengetahui sektor-sektor kegiatan ekonomi yang dapat diprioritaskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Masalah utama di dalam pelaksanaan pembangunan di daerah adalah kurang mampunya pemerintah daerah melaksanakan strategi perencanaan yang matang serta kurang jelinya pemerintah daerah dalam melihat pergeseran-pergeseran

yang terjadi dari tahun ke tahun dalam sektor ekonomi. Disinilah peran Badan Pengawasan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) cukup dominan dalam menentukan arah serta rencana pembangunan di daerah agar pembangunan di daerah berjalan sesuai prioritas sektor yang diinginkan.

Tujuan akhir dari pembangunan adalah naiknya pertumbuhan ekonomi melalui naiknya PDRB yang berarti pula akan menaikkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **"ANALISIS PERGESERAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI KOTA PALEMBANG TAHUN 1991-2001"**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui:

1.2.1. Bagaimana pergeseran sektor ekonomi Kota Palembang Tahun 1991 2001?

1.2.2. Bagaimana pertumbuhan sektor ekonomi Kota Palembang Tahun 1991-2001 dibandingkan dengan sektor ekonomi Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan metode analisis *Shift-Share* (S-S) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Untuk menganalisa pergeseran sektor-sektor ekonomi Kota Palembang Tahun 1991-2001 dibandingkan dengan sektor ekonomi Propinsi Sumatera Selatan.

1.3.2 Untuk menganalisa pertumbuhan sektor ekonomi Kota Palembang Tahun 1991-2001 dibandingkan dengan sektor ekonomi Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan metode analisis *Shift-Share* (S-S).

1.4. Manfaat Penelitian

Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk:

1.4.1 Bagi penulis hasil penelitian ini merupakan aplikasi dan penerapan langsung dari salah satu alat analisis ekonomi yang didapat di bangku kuliah.

1.4.2 Guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

1.4.3 Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber hasil penelitian yang telah ada serta laporan-laporan dari instansi tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara riset kepustakaan (*library research*) yang bertujuan mendapatkan literatur-literatur serta buku-buku bacaan yang relevan antara lain seperti buku-buku terbitan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawasan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), serta dari instansi-instansi terkait lainnya.

1.5.3 Data Yang Dibutuhkan

- PDRB Propinsi Sumatera Selatan menurut sektor tahun 1991-2001 atas dasar harga konstan Tahun 1993.
- PDRB Kota Palembang menurut sektor Tahun 1991-2001 atas dasar harga konstan Tahun 1993.
- Data pendukung lainnya.

1.5.4 Sumber Data

- Kantor BPS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Kantor BPS Propinsi Sumatera Selatan.
- Kantor BPS Kota Palembang.
- Kantor BAPPEDA Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan.
- Kantor BAPPEDA Kota Palembang.
- Perpustakaan Universitas Islam Indonesia.
- Dan Lain-lain.

1.5.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada sektor-sektor perekonomian di Kota Palembang.

1.6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan dua metode analisis, yaitu:

1. Metode Analisis Deskriptif, yaitu dengan cara pendeskripsian faktor-faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang dimaksud sebagai pendukung hasil untuk menjawab tujuan dari hasil penelitian ini.
2. Metode Analisis Kuantitatif, yaitu suatu metode yang menggunakan rumus-rumus tertentu yang sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis perencanaan pembangunan yaitu Shift-Share (S-S).

   Analisis *Shift-Share* (S-S):

   Teknik analisis *Shift-Share* adalah suatu teknik analisis dalam perencanaan pembangunan yang menganalisis bagaimana masing-masing sektor dalam perekonomian daerah tumbuh dari tahun ke tahun terhadap perekonomian secara nasional, dengan cara membandingkan kinerja sektor ekonomi di daerah dengan kinerja ekonomi secara nasional. Jadi teknik *Shift-Share* (S-S) ini membandingkan laju pertumbuhan perekonomian disuatu daerah dengan laju pertumbuhan secara nasional.

Dengan melihat laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah dan nasional akan dapat terlihat pergeseran (*Shift*) ini sektor-sektor perekonomian daerah, sekaligus melihat kapan daerah itu memperoleh pertumbuhan dan kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian nasional.

Teknik *Shift-Share* ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah yaitu pendapatan atau output sektor-sektor ekonomi propinsi selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh pertumbuhan nasional (N). Pengaruh pertumbuhan nasional disebut pengaruh pangsa (*Share*), bauran industri (M), pengaruh bauran industri disebut bauran komposisi (proporsional shiff) dan keunggulan kompetitif (C), pengaruh keunggulan kompetitif disebut regional share, karena itulah teknik analisis ini dinamakan teknik analisis *Shift-Share.*

Bentuk umum persamaan analisis *Shift-Share* dan komponen-komponen adalah sebagai berikut (Soepono, 1993, hlm. 43):

$$Dij = Nij + Mij + Cij$$

Keterangan:

i = Sektor-sektor ekonomi yang diteliti

j = Variabel ekonomi yang diteliti

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pendapatan atau nilai sektor yang dinotasikan sebagai (Y).

$$Dij = Y^*ij - Yij$$

$$Nij = Yij \,.\, rn$$

$$Mij = Yij\,(rin-rn)$$

$$Cij = Yij\,(rij-rin)$$

Dimana rij, rin, dan rn mewakili laju pertumbuhan propinsi dan pertumbuhan secara nasional yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

$$rij = \frac{(Y^*ij - Yij)}{Yij}$$

$$rin = \frac{(Y^*ij - Yin)}{Yin}$$

$$rn = \frac{(Y^*n - Yn)}{Yn}$$

Secara keseluruhan wilayah, persamaan untuk sektor i di wilayah j adalah:

$$Dij = Yij \,.\, rn + Yij\,(rin-rn) + Yij\,(rij-rin)$$

Keterangan:

D = Variabel wilayah

N = Pertumbuhan regional

M = Bauran industri (*industry mix*)

C = Keunggulan kompetitif (*regional share*)

rij = Laju pertumbuhan pada sektor i di wilayah j

rin = Laju pertumbuhan pada sektor i di wilayah n

rn = Laju pertumbuhan regional

Yij = Pendapatan di sektor i di wilayah j

Yin = Pendapatan di sektor i di tingkat regional

Yn = Pendapatan regional

Y* = Pendapatan tahun terakhir analisis

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 6 bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II. TELAAH PUSTAKA

Telaah Pustaka, berisi tentang hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

BAB III. LANDASAN TEORI

Landasan Teori, berisi teori – teori yang terkait dengan yang diteliti atau konsep yang sesuai dan melandasi penelitian ini, sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

BAB IV. GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

Gambaran Umum Subyek Penelitian, berisi uraian atau gambaran secara umum atas subyek penelitian.

BAB V. ANALISA DATA

Analisa Data, berisi data-data yang diperlukan untuk perhitungan, hasil perhitungan analisis *Shift-Share* dan penjelasan-penjelasan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini akan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang didapat dari hasil perhitungan. Serta saran-saran yang sesuai dengan permasalahan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Telaah Pustaka diarahkan untuk mendapatkan landasan teori dari literatur yang relevan dengan analisis yang digunakan, dan dasar-dasar teori dari sumber-sumber lain yang mendukung dalam penelitian ini.

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang pernah ada dan yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan maksud untuk dijadikan bahan acuan dan sebagai landasan untuk melakukan penelitian. Dalam bab ini penulis berusaha untuk mencari kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing peneliti sebelumnya. Melihat dari hasil penelitian sebelumnya tersebut, penulis berusaha untuk melakukan penelitian dengan obyek penelitian yang meliputi waktu penelitian dan tempat penelitian yang berbeda dengan yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Persamaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa mereka menggunakan alat analisis yang sama yaitu alat analisis *Shift-Share* (S-S) terhadap penelitian yang sedang dilakukan dan ada sebagian bab maupun cara penelitian yang mereka lakukan adalah mempunyai kesamaan. Sedangkan yang membedakan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya adalah mengenai masalah tempat penelitian atau obyek penelitian dan kurun waktu penelitian.

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu hasil dari penulisan yang dilakukan oleh Ityanto (2001) dengan judul " Analisis Pergeseran Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Tingkat II Wonosobo Tahun 1989-1998". Penelitian ini menggunakan 2 alat analisa yaitu *Shift-Share* (S-S) dan Location Quotient (LQ). Adapun kesimpulan dari penelitian ini, dalam struktur perekonomian Kabupaten Wonosobo Tahun 1989-1998 menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor pemimpin (*leading sector*), yang berarti sektor pertanian merupakan sektor yang peranannya atau kontribusinya terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonosobo paling besar.

Berdasarkan analisis *Shift-Share* tahun 1989-1998 menunjukkan bahwa total laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Wonosobo adalah positif, kalau kita lihat dari pengaruh komponen pertumbuhan propinsi (Nij) maka pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Wonosobo juga menunjukkan nilai yang positif. Dilihat dari pengaruh bauran industri (Mij) menunjukkan bahwa sektor Pertanian, sektor Bangunan, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta sektor Jasa-Jasa menunjukkan kontribusi pertumbuhan pendapatan yang negatif, ini berarti pertumbuhan sektor-sektor tersebut dibandingkan dengan sektor sejenis dalam Propinsi Jawa Tengah lebih lambat. Sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Angkutan dan Komunikasi menunjukkan nilai yang positif.

Dilihat dari pengaruh keunggulan kompetitif (Cij) menunjukkan bahwa kontribusi pertumbuhan untuk sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih serta sektor Angkutan dan Komunikasi menunjukkan nilai yang positif, sedang sektor Bangunan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, serta sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta sektor Jasa-Jasa adalah negatif. Secara keseluruhan (Dij) tingkat pertumbuhan pendapatan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Wonosobo menunjukkan nilai yang positif. Sektor Pertanian merupakan sektor yang menjadi pemimpin (*leading sector*) yang menjadi sektor andalan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Wonosobo. Disusul sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Angkutan dan Komunikasi, sektor Industri Pengolahan dan sektor Bangunan.

Berdasarkan analisa Loqation Quotient sektor yang paling potensial dan paling dapat diandalkan dalam pembentukan pendapatan regional (PDRB) Kabupaten daerah tingkat II Wonosobo selama tahun 1989-1998 adalah sektor Pertanian.

Begitu pula dalam penelitian Mulyantoro (2001) di Kabupaten Gunungkidul dengan judul " Analisis Arah Pergeseran Sektor Perekonomian Kabupaten Gunungkidul Tahun 1990-1999 ". Dari hasil penelitian serta hasil analisis *Shift-Share* (S-S) pada sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian Kabupaten Gunugkidul dimana secara keseluruhan tingkat pertumbuhan pendapatan sektor ekonomi Kabupaten Gunungkidul menunjukkan nilai yang positif dan sektor

Pertanian, sektor Jasa-Jasa, dan Industri Pengolahan merupakan sektor yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang paling tinggi dan sekaligus sektor pemimpin yang menjadi sektor andalan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gunungkidul selama tahun analisis 1990-1999.

Disusul sektor-sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Perdagangan, Hotel, dan Restoran, sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih. Sebagai kesimpulan akhir dari hasil analisis *Shift-Share* (S-S) adalah bahwa arah perekonomian sektor-sektor ekonomi Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh sektor Pertanian dengan sumbangan sebesar 36,46 %.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1. Definisi Perencanaan Ekonomi

Istilah perencanaan pembangunan (ekonomi) sudah sangat umum kita dengar dalam pembicaraan sehari-hari. Namun demikian, hampir semua buku teks tentang perencanaan memberikan pengertian berbeda-beda dan banyak dokumen perencanaan nasional atau pernyataan dari para pemimpin politik yang memperkenalkan pengertian mereka sendiri. Lebih dari itu, diantara para ekonom pun belum ada kesepakatan tentang pengertian istilah perencanaan ekonomi tersebut. Berikut ini dikemukakan pendapat dari beberapa ahli:

Menurut Conyers & Hills (1994) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan sebagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan definisi tersebut berarti ada 4 elemen dasar perencanaan yakni (Arsyad, 1999, hlm. 112):

a. "Merencanakan berarti memilih."
b. Perencaaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya.
c. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan.
d. Perencanaan untuk masa depan.

Sementara itu, Arthur Lewis dalam bukunya yang berjudul *Development Planning* (1966) membagi perencanaan dalam 6 pengertian, yaitu:

1. Istilah perencanaan sering kali dihubungkan dengan faktor letak geografis, bangunan tempat tinggal, bioskop dan lainnya. Di NSB hal ini sering disebut dengan istilah perencanaan kota dan negara (*town and country planning*), atau perencanaan tata guna tanah (*land-use planning*), atau perencanaan fisik (*physical planning*), atau perencanaan kota dan daerah (*urban and regional planning*).
2. Perencanaan mempunyai arti keputusan penggunaan dana pemerintah di masa yang akan datang.
3. Ekonomi berencana adalah ekonomi dimana setiap unit produksi hanya memanfaatkan sumberdaya manusia, bahan baku, dan peralatan yang dialokasikan dengan jumlah tertentu dan menjual produknya hanya kepada perusahaan atau perorangan yang ditunjuk oleh pemerintah.
4. Perencanaan berarti setiap penentuan sasaran produksi oleh pemerintah.
5. Penetapan sasaran untuk perekonomian secara keseluruhan dengan maksud untuk mengalokasikan semua tenaga kerja, devisa, bahan mentah dan sumberdaya lainnya ke berbagai bidang perekonomian.
6. Untuk menggambarkan sarana yang digunakan pemerintah untuk memaksakan sasaran-sasaran yang ditetapkan.

Perencanaan sebenarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan (*policy*) dari pembuat keputusan berdasarkan sumberdaya yang tersedia dan disusun secara sistematis. Maka pelaksanaan perancangan pembuatan perencanaan itu pada dasarnya adalah mengambil suatu kebijaksanaan (*policy*) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (Soekartawi, 1990, hlm. 4):

1. Perencanaan berarti "memilih berbagai alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada."
2. Perencanaan berarti pula alokasi sumberdaya yang tersedia.
3. Perencanaan mengandung arti rumusan yang sistematis yang didasarkan pada kepentingan masyarakat banyak.
4. Perencanaan juga menyangkut masalah tujuan atau sasaran tertentu yang harus dicapai.
5. Perencanaan juga dapat diartikan atau dikaitkan dengan kepentingan masa depan.

Walaupun tidak ada kesepakatan di antara para ekonom berkenaan dengan istilah perencanaan ekonomi, sebagian besar ekonom menganggap perencanaan ekonomi mengadung arti pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula. (Aryad,1999, hlm. 114)

3.2. Fungsi Perencanaan Ekonomi

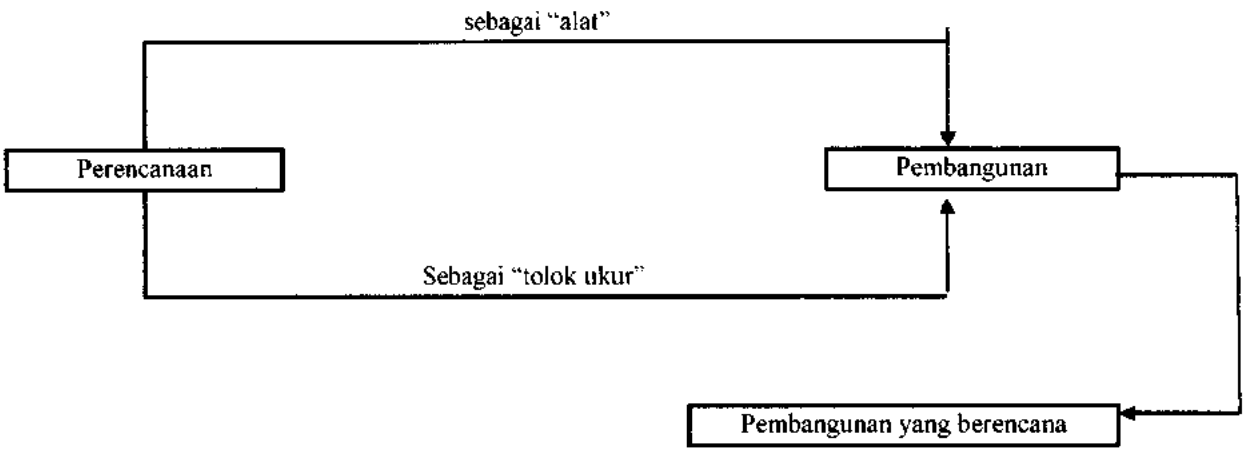
Dalam beberapa buku literatur perencanaan pembangunan (*development planning*), maka pembahasan terhadap pentingnya perencanaan ini sering dikaitkan dengan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, pembahasan pentingnya aspek perencanaan yang dikaitkan dengan aspek pembangunan dapat diklasifikasikan menjadi dua topik utama, yaitu:

a. Perencanaan sebagai "alat" dari pembangunan; dan

b. Pembangunan sebagai tolok-ukur dari berhasil-tidaknya pembangunan tersebut.

Secara skematis, kaitan antara aspek perencanaan dan pembangunan dapat digambarkan seperti Gambar 3.1 dibawah ini:

Gambar 3.1
Skema Kaitan Antara Perencanaan dan Pembangunan



Perencanaan dianggap sebagai "alat" pembangunan, karena perencanaan memang merupakan alat strategis dalam menuntun jalannya pembangunan. Suatu perencanaan yang disusun secara acak-acakan (tidak sistematis) dan tidak

memperhatikan aspirasi target *group* (sasaran), maka pembangunan yang dihasilkan juga tidak seperti yang diharapkan. Dengan demikian, maka di dalam konteks perencanaan sebagai "alat," maka ia mempunyai keunggulan komprehensif sebagai berikut:

a. Perencanaan dapat dipakai sebagai alat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.
b. Perencanaan dapat dipakai sebagai alat penentuan berbagai alternatif dari berbagai kegiatan pembangunan.
c. Perencanaan dapat dipakai sebagai penentuan skala prioritas.
d. Perencanaan dapat dipakai sebagai alat "peramalan" (*forecasting*) dari kegiatan pada masa akan datang.

Sementara menurut Lincolin Arsyad (1999), fungsi-fungsi perencanaan adalah sebagai berikut:

a. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
b. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.

d. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
e. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi.

3.3. Proses Perencanaan Ekonomi

Proses perencanaan merupakan hal mendasar yang harus diperhatikan oleh para pembuat keputusan (perencana), adapun proses perencanaan ekonomi tersebut dibagi ke dalam 4 tahap diantaranya adalah:

Tahap pertama, dimana pada tahap ini ditetapkan tujuan oleh para pemimpin politik, serta prioritas-prioritas tujuan untuk mengarahkan para perencana jika terjadi konflik tujuan. Tahap kedua adalah mengukur ketersediaan sumberdaya-sumberdaya yang langka selama periode perencanaan tersebut Pada tahap ketiga hampir semua dari upaya ekonomi ditujukan untuk memilih berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pada tahap akhir perencanaan mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional (*welfare function*) tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumberdaya dan organisasional. Hasil dari proses ini adalah strategi pembangunan (*development strategy*) atau rencana yang mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama beberapa tahun biasanya 5 tahun. (Arsyad, 1999, hlm. 119)

3.4. Syarat-Syarat Keberhasilan Suatu Perencanaan

Menurut Jhingan (1983) dikutip oleh Lincolin Arsyad perumusan dan kunci keberhasilan suatu perencanaan biasanya memerlukan adanya hal-hal berikut ini:

a. Prasyarat pertama bagi suatu perencanaan adalah pembentukan suatu komisi perencanaan yang harus diorganisir dengan cara yang tepat.
b. Perencanaan yang baik membutuhkan adanya analisis yang menyeluruh tentang potensi sumberdaya yang dimiliki suatu negara beserta segala kekurangannya. Analisis seperti ini penting untuk mengumpulkan informasi dan data statistik serta sumber-sumberdaya potensial lain. Oleh karena itu pembentukan suatu jaringan kantor statistik dari pusat hingga daerah yang bertugas mengumpulkan informasi dan data statistik menjadi suatu kebutuhan yang utama.
c. Penetapan berbagai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai hendaknya realistis dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara tersebut.
d. Penetapan sasaran dan prioritas untuk pencapaian suatu tujuan perencanaan dibuat secara makro dan sektoral.
e. Dalam perencanaan ditetapkan adanya pembiayaan oleh pemerintah sebagai dasar mobilisasi sumber daya yang tersedia.
f. Suatu perencanaan hendaknya mampu menjamin keseimbangan dalam perekonomian.
g. Administrasi yang baik, efisien, dan tidak korup adalah syarat mutlak keberhasilan suatu perencanaan.

h. Pemerintah harus menetapkan kebijaksanaan pembangunan yang tepat demi berhasilnya rencana pembangunan dan untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaannya.

i. Setiap usaha harus dibuat berdampak ekonomis dalam administrasi, khususnya dalam pengembangan bagian-bagian departemen dan pemerintahan.

j. Administrasi yang bersih dan efisien memerlukan dasar pendidikan yang kuat. Perencanaan yang berhasil harus memperhatikan standar moral dan etika masyarakat.

k. Suatu syarat penting dalam perencanaan pembangunan modern adalah bahwa perencanaan tersebut harus dilandasi oleh teori konsumsi.

l. Dukungan masyarakat merupakan faktor penting bagi keberhasilan suatu perencanaan di dalam suatu negara yang demokratis.

3.5. Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi

Pada sub bab ini akan dibahas teori-teori mengenai faktor-faktor yang menimbulkan dan menentukan laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Adapun teori-teori tersebut dapat disimak pada uraian sebagai berikut:

3.5.1. Adam Smith

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa beternak, masa bercocoktanam, perdagangan dan yang terakhir adalah tahap perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke

masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antarpelaku ekonomi. Dalam hal ini Adam Smith memandang pekerja sebagai salah salah satu input (masukan) bagi proses produksi. Pembagian kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori Adam Smith, dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Dalam pembangunan ekonomi, modal memegang peranan yang penting. Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Modal tersebut diperoleh dari tabungan yang dilakukan masyarakat. Adanya akumulasi modal yang dihasilkan dari tabungan, maka pelaku ekonomi dapat menginvestasikannya ke sektor riil, dalam upaya untuk meningkatkan penerimaannya.

Menurut Adam Smith proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu "fungsi tujuan" pada akhirnya harus tunduk terhadap "fungsi kendala" yaitu keterbatasan sumberdaya ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mulai mengalami perlambatan jika daya dukung alam tidak mampu lagi mengimbangi aktivitas ekonomi yang ada. Keterbatasan

sumberdaya merupakan faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi tersebut, bahkan dalam perkembangannya hal tersebut justru menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. (Kuncoro, 1997, hlm. 38)

3.5.2. Friedrich List

Pemikiran List tertuang dalam bukunya yang berjudul *Das Nationale der Politischen Oekonomie* (1840). Menurut List, sistem liberalisme yang *laissez-faire* dapat menjamin alokasi sumberdaya secara optimal. Perkembangan ekonomi sebenarnya tergantung pada peranan pemerintah, organisasi swasta dan lingkungan kebudayaan. Perkembangan ekonomi hanya akan terjadi, menurut List, jika dalam masyarakat ada kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perorangan. List juga menegaskan bahwa negara dan pemerintah harus melindungi kepentingan golongan lemah di antara masyarakat.

Perkembangan ekonomi, menurut List, melalui 5 tahap yaitu tahap primitif, beternak, pertanian, pertanian dan industri pengolahan (*manufacturing*), dan akhirnya pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.

Selain itu, List juga berpendapat bahwa daerah-daerah beriklim sedang paling cocok untuk pengembangan industri, karena adanya kepadatan penduduk yang sedang yang merupakan pasar yang cukup memadai. Sedangkan daerah tropis kurang cocok untuk industri karena pada umumnya daerah tersebut berpenduduk sangat padat dan pertanian masih kurang efisien.

Akhirnya, sektor industri pengolahan sangat perlu dikembangkan dalam pembangunan ekonomi, walaupun pada awalnya perlu diberikan proteksi, terutama untuk industri yang baru berkembang (*infant industries*). Di lain pihak, sektor pertanian tidak perlu diberi proteksi sebab sektor pertanian akan mendapat manfaat dengan sendirinya dari pertumbuhan industri.

3.5.3. Walt Whitman Rostow

Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap yaitu masyarakat tradisional (*the traditional society*), prasyarat untuk tinggal landas (*the preconditions for take-off*), tinggal landas (*the take-off*), menuju kedewasaan (*the drive to maturity*), dan masa konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*).

Dasar pembedaan tahap pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap tersebut adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial, dan politik, yang terjadi. Menurut Rostow, pembanguna ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat moderen merupakan suatu proses yang multi-dimensional. Pembangunan ekonomi bukan hanya berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja.

Menurut Rostow, disamping seperti perubahan itu, pembangunan ekonomi berarti pula sebagai suatu proses yang menyebabkan antara lain:

a. Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi ke luar.
b. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil.
c. Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif (menumpuk emas, membeli rumah, dan sebagainya) menjadi investasi yang produktif.
d. Perubahan sikap hidup dan adat istiadat kurang merangsang pembangunan ekonomi (misalnya perubahan sikap yang tadinya kurang menghargai waktu, kurang menghargai prestasi perorangan, dan sebagainya).

Adapun 5 tahap proses pembangunan ekonomi tersebut adalah:

a. Masyarakat Tradisional

Menurut Rostow, yang dimaksudkan dengan masyarakat tradisional adalah masyarakat yang fungsi produksinya terbatas yang ditandai oleh cara produksi yang relatif masih primitif yang didasarkan pada ilmu dan teknologi pra-Newton dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional, tetapi kebiasaan tersebut telah turun temurun.

Dalam suatu masyarakat tradisional, menurut Rostow, tingkat produk-tivitas per pekerja masih rendah, oleh karena itu sebagian besar sumberdaya masyarakat digunakan untuk kegiatan sektor pertanian. Dalam

sektor pertanian ini, struktur sosialnya bersifat hirarkis yaitu mobilitas vertikal anggota masyarakat dalam struktur sosial kemungkinannya sangat kecil.

Sementara itu kegiatan politik dan pemerintahan pada masa ini digambarkan Rostow dengan adanya kenyataan bahwa walaupun kadang-kadang terdapat sentralisasi dalam pemerintahan, tetapi pusat kekuasaan politik di daerah-daerah berada di tangan para tuan tanah yang ada di daerah tersebut. Kebijaksanaan pemerintah pusat selalu dipengaruhi oleh pandangan para tuan tanah di daerah tersebut.

b. Prasyarat Tinggal Landas

Tahap prasyarat tinggal landas ini didefinisikan Rostow sebagai suatu masa transisi dimana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri (*self-sustained growth*). Menurut Rostow, pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis.

c. Tinggal Landas.

e. Tahap Menuju Kedewasaan.

f. Tahap Konsumsi Tinggi. (Arsyad, 1999, hlm. 47)

3.5.4. Harrod Domar

Teori Harrod Domar ini mempunyai beberapa asumsi yaitu:

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
2. Perekonomian terdiri dari 2 sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
4. Kecenderungan untuk menabung (*marginal ropensity to save* = MPS) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output (*capital-output ratio* = COR) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital-output ratio* = ICOR).

Setiap peerekonomian menurut Harrod Domar dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal.

Rasio modal-output (COR) sebagai suatu hubungan antara investasi yang ditanamkan dengan pendapatan tahunan yang dihasilkan dari investasi tersebut. (Arsyad, 1999, hlm. 64)

3.6. Pembangunan Regional Dan Sektoral

3.6.1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Arsyad, 1999, hlm. 298)

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarka pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu suatu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah -beserta pertisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada- harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. (Arsyad, 1999, hlm. 298)

3.6.2. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah

3.6.2.1. Teori Ekonomi Neo Klasik

Peranan teori ekonomi Neo Klasik tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan daerah (regional) karena teori ini tidak memiliki dimensi spasial yang signifikan. Namun demikian, teori ini memberikan 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi.

3.6.2.2. Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*)

Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja

dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*).

3.6.2.3. Teori Lokasi

Para ekonomi regional sering mengatakan bahwa ada 3 faktor yang mem-pengaruhi pertumbuhan daerah yaitu: lokasi, lokasi, dan lokasi! Pernyataan tersebut sangat masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung untuk meminimumkan biayanya dengan cara memilih lokasi yang memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar.

3.6.2.4. Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral (*central place theory*) menganggap bahwa ada hirarki tempat (*hierarchy of places*). Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industi dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

3.6.2.5. Teori Kausasi Kumulatif

Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari tesis kausasi kumulatif (*cumulative causation*) ini. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut (maju versus terbelakang). Daerah

yang maju mengalami akomulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah lainnya. Hal ini yang disebut Myrdal (1957) sebagai *backwash effects*.

3.6.2.6. Model Daya Tarik (Attraction)

Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif. (Arsyad, 1999, hlm. 300)

3.6.3. Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Teori pembangunan yang ada sekarang ini (seperti yang diuraikan dimuka) tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan dirumuskan di sini untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pem-bangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini dapat disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

KOMPONEN	KONSEP LAMA	KONSEP BARU
Kesempatan kerja	Semakin banyak perusahaan = Semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaaan yang sesuai dengan "kondisi" penduduk daerah
Basis Pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Aset-aset Lokasi	Keunggulan Komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan Kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumberdaya pengetahuan	Ketersediaan Angkatan Kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

(Arsyad, 1999, hlm. 302)

3.6.4. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggungjawab.

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik dan sektor swasta -petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi-organisasi sosial- harus mempunyai peran dalam proses perencanaan. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai

suatu unit ekonomi (*economic entity*) yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain.

3.6.5. Perlunya Perencanaan Pembangunan Daerah

Para ahli ekonomi menyadari bahwa mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat terutama di negara sedang berkembang (NSB), mereka mulai sadar bahwa campur tangan pemerintah, terutama dalam pembangunan daerah, dimaksudkan untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasilnya dapat dinikmati berbagai daerah yang ada. (Arsyad, 1999, hlm. 303)

3.6.6. Implikasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Ada 3 implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah: pertama, perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional di mana daerah tersebut bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut. Kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional. Ketiga, perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah -misalnya, administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas- biasanya sangat berbeda

pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu, perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan.

3.6.7. Tahap-Tahap Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Blakely (1989) dikutip oleh Lincolin Arsyad ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah seperti yang disajikan pada Bagan 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Tahapan dan Kegiatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

TAHAP	KEGIATAN
I	**Pengumpulan dan Analisis Data** • Penentuan Basis Ekonomi • Analisis Struktur Tenaga Kerja • Evaluasi Kebutuhan Tenaga kerja • Analisis Peluang dan Kendala Pembangunan • Analisis Kapasitas Kelembagaan
II	**Pemilihan Startegi Pembangunan Daerah** • Penentuan Tujuan dan Kriteria • Penentuan Kemungkinan-kemungkinan Tindakan • Penyusunan Strategi
III	**Pemilihan Proyek-proyek Pembangunan** • Identifikasi Proyek • Penilaian Viabilitas Proyek
IV	**Pembuatan Rencana Tindakan** • Prapenilaian Hasil Proyek • Pengembangan Input Proyek

	• Penentuan Alternatif Sumber Pembiayaan • Identifikasi Struktur Proyek
V	**Penentuan Rincian Proyek** • Pelaksanaan Studi Kelayakan Secara Rinci • Penyiapan Rencana Usaha (*Business Plan*) • Pengembangan, Monitoring, dan Pengevaluasian Program
VI	**Persiapan Perencanaan Secara Keseluruhan dan Implementasi** • Penyiapan Skedul Implementasi Rencana Proyek • Penyusunan Program Pembangunan Secara Keseluruhan • *Targeting* dan *Marketing* Aset-aset Masyarakat • Pemasaran Kebutuhan Keuangan

(Arsyad, 1999, hlm. 308)

BAB IV

GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

4.1. Kondisi Geografis dan Keadaan Wilayah

4.1.1. Letak Geografis

Kota Palembang sebagai ibu kota propinsi sekaligus merupakan salah satu daerah Tingkat II dalam Propinsi Sumatera Selatan, secara geografis terletak diantara 2° 52" – 3° 5 Lintang Selatan dan 104° 37" – 104° 52 Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 12 meter diatas permukaan laut.

Berdasarkan pasal 4 PP No.23 tahun 1988 tanggal 6 Desember 1988 tentang perubahan batas wilayah Kota Palembang, Kabupaten Dati II Musi Banyu Asin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dinyatakan bahwa: Sebelah Utara dibatasi dengan Desa Pangkalan Benteng, Desa Gasing dan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Dati II Musi Banyu Asin; Sebelah Selatan dibatasi dengan Desa Bakung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kecamatan Gelombang Kabupaten Dati II Muara Enim; Sebelah Timur dibatasi dengan Balai Makmur Kecamatan Banyu Asin I Kabupaten Dati II Musi Banyu Asin; Sebelah Barat dibatasi dengan Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Dati II Musi Banyu Asin.

4.1.2. Kondisi Wilayah

a. Luas Kota Palembang lebih kurang 400,61 Km^2. Dimana Kota Palembang dahulunya adalah Kota Air. Jarak Kota Palembang dengan kota/kabupaten lain adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jarak (km)
1	Palembang – Lubuk Linggau	390
2	Palembang – Baturaja	384
3	Palembang – Lahat	226
4	Palembang – Pagar Alam	276
5	Palembang – Muara Enim	183
6	Palembang – Sekayu	124
7	Palembang – Banyu Asin	60
8	Palembang – Kayu Agung	66

b. Secara administrasi Kota Palembang terdiri dari 14 Kecamatan dan 103 Kelurahan, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Banyaknya Kelurahan dan Desa per Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2002

Kecamatan	Kelurahan
1. Ilir Barat II	7
2. Gandus	5
3. Seberang Ulu I	10
4. Kertapati	6
5. Seberang Ulu II	7
6. Plaju	7
7. Ilir Barat I	6
8. Bukit Kecil	6
9. Ilir Timur I	11
10. Kemuning	6
11. Ilir Timur II	12
12. Kalidoni	5
13. Sako	6
14. Sukarami	9
Palembang	**103**

Sumber : Bappeda Kota Palembang

4.1.3. Kondisi Kependudukan

Penduduk merupakan unsur yang penting dalam kegiatan ekonomi untuk membangun suatu perekonomian, terutama dalam usaha meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi, karena dapat menyediakan tenaga kerja, tenaga beli, pemimpin perusahaan dan usahawan yang diperlukan untuk menciptakan suatu kegiatan ekonomi.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000, jumlah penduduk Kota Palembang pada tahun 2002 sebesar 1.339.315 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebesar 667.196 jiwa (49,81 %) dan penduduk perempuan sebesar 672.116 jiwa (50,19 %), terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Jika dilihat per kecamatan tampaknya penduduk Kota Palembang terakumulasi di kecamatan Sukarami sebesar 12,12 % (163.710 jiwa), urutan kedua di kecamatan Ilir Timur II sebesar 12,11 % (162.142 jiwa) dan diurutan ketiga di kecamatan Seberang Ulu I sebesar 11,05 % (147.965 jiwa). Di tiga kecamatan tersebut yaitu kecamatan Sukarami jumlah penduduk perempuan sebesar 81.496 dan penduduk laki-laki sebesar 82.214 jiwa. Di kecamatan Ilir Timur II jumlah penduduk perempuan berjumlah 81.047 jiwa dan penduduk laki-laki berjumlah 81.095 jiwa, sedangkan di kecamatan Seberang Ulu I penduduk perempuannya berjumlah 74.058 jiwa dan penduduk laki-laki berjumlah 73.907 jiwa. Seperti telah disinggung diatas dapat dimaklumi bahwa

berkurangnya jumlah penduduk pada setiap kecamatan karena adanya pemekaran wilayah pada tingkat kecamatan.

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan seberapa besar penduduk di suatu daerah berubah dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan penduduk Kota Palembang sebesar 1,27 , artinya setiap tahun penduduk Palembang berubah 1,27 persen. Hal ini bisa dikarenakan karena angka migrasi keluar dan angka kematian lebih tinggi dibandingkan angka migrasi kedalam dan angka kelahiran.

Kepadatan penduduk Kota Palembang tahun 2002 sebesar 3.343 jiwa per km^2. Kecamatan yang terpadat adalah kecamatan Sukarami dengan tingkat kepadatan sebesar 10.792 jiwa per km^2, sedangkan tingkat kepadatan yang terendah adalah kecamatan Gandus sebesar 729 jiwa per km^2.

Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan jumlah penduduk, luas dan kepadatan penduduk di Kota Palembang menurut Kecamatan Tahun 2002.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk
di Kota Palembang Tahun 2002

Kecamatan	Luas (KM^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1. Ilir Barat II	6,224	64.705	10.396
2. Gandus	68,776	50.133	729
3. Seberang Ulu I	17,445	147.965	8.482
4. Kertapati	42,555	78.695	1.849
5. Seberang Ulu II	10,690	86.818	8.121
6. Plaju	9,920	81.409	8.206
7. Ilir Barat I	19,770	110.897	5.609
8. Bukit Kecil	9,000	47.810	5.312
9. Ilir Timur I	6,500	80.400	12.369
10. Kemuning	27,920	84.931	3.042
11. Ilir Timur II	25,580	162.142	6.339
12. Kalidoni	42,500	87.083	2.049
13. Sako	98,560	92.617	940
14. Sukarami	15,170	163.710	10.792
Total	**400,61**	**1.339.315**	**3.343**

Sumber : BPS Kota Palembang, diolah dari SP 2000

4.1.4. Kondisi Ketenagakerjaan

Berdasarkan data yang dilaporkan dari Kantor Dinas Tenaga Kerja. Jumlah pencari Kerja di Kota Palembang tahun 2002 menurut tingkat pendidikan dari SD sampai dengan Sarjana sebesar 24.475 orang, sedangkan yang dapat ditempatkan hanya sebesar 2,26 persen atau hanya sebesar 552 orang.

Dilihat dari tingkat pendidikan pencari kerja di kota metropolis ini tampaknya pencari kerja dengan basis pendidikan SMU merupakan pencari kerja yang paling besar yaitu sebesar 14.110 (57,65 %) dari total pencari kerja, kemudian yang berpendidikan sarjana diurutan kedua yaitu sebesar

6.720 (27,50 %), sedangkan yang berbasis pendidikan sarjana muda berada di urutan ketiga yaitu sebesar 2.774 (11,33 %).

Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan jumlah pencari kerja di Kota Palembang menurut tingkat pendidikan tahun 2002.

Tabel 4.3
Jumlah Pencari Kerja di Kota Palembang
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2002

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak Tamat SD	-
Tamat SD	108
Tamat SMTP	363
Tamat SMU	14.110
D1/D2	390
Sarjana Muda	2.774
Sarjana	6.730
Jumlah	**24.475**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang

Sedangkan jumlah pencari kerja yang dapat ditempatkan dan terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja menurut tingkat pendidikan di Kota Palembang tahun 2002 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Jumlah Pencari Kerja Yang Dapat Ditempatkan dan Terdaftar
Pada Dinas Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
di Kota Palembang Tahun 2002

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak Tamat SD	-
Tamat SD	-
Tamat SMTP	-
Tamat SMU	465
Sarjana Muda	19
Sarjana	68
Jumlah	**552**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang

4.2. Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sumatera Selatan

a. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama dalam mengukur pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. PDRB Sumatera Selatan dengan migas atas dasar harga berlaku selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut: tahun 1998 sebesar 33.071.513 juta rupiah, tahun 1999 sebesar 33.036.445 juta rupiah, dan tahun 2000 sebesar 45.668.901 juta rupiah.

Berdasarkan harga berlaku, terdapat empat lapangan usaha/sektor yang dominan memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB seperti disajikan di bawah ini.

Tabel 4.5
Distribusi Persentase PDRB Dengan Migas
Atas Dasar Harga Berlaku (%)

Lapangan Usaha	1998	1999	2000
Pertanian	19,84	19,90	17,19
Pertambangan dan Penggalian	25,10	22,40	32,23
Industri Pengolahan	21,22	21,39	17,63
Perdagangan	15,40	16,65	14,78
Lainnya	18,44	19,71	18,17
Total PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Sumsel Dalam Angka 2000

Sementara itu, PDRB dengan migas Sumatera Selatan dari tahun 1998 hingga 2000 bernilai: 13.239.321 juta rupiah tahun 1998, 13.659.787 juta rupiah tahun 1999, dan 14.468.495 juta rupiah tahun 2000. Sedangkan distribusi persentasenya disajikan di bawah ini.

Tabel 4.6
Distribusi Persentase PDRB Dengan Migas
Atas Dasar Harga Konstan (%)

Lapangan Usaha	1998	1999	2000
Pertanian	20,99	20,79	20,59
Pertambangan dan Penggalian	17,10	17,90	19,26
Industri Pengolahan	20,42	19,77	19,43
Perdagangan	18,08	18,80	18,63
Lainnya	23,41	22,74	22,09
Total PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Sumsel Dalam Angka 2000

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dengan migas tahun 2000 rata-rata sebesar 5,92 persen. Angka ini lebih baik dibandingkan tahun 1999 bernilai sebesar 3,18 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tanpa migas pada tahun 2000 tumbuh sebesar 3,58 persen.

Tabel 4.7
Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan
Tahun 1998-2000 (%)

Tahun	Dengan Migas	Tanpa Migas
1998	-6,81	-8,80
1999	3,18	1,53
2000	5,92	3,58

Sumber : Sumsel Dalam Angka 2000

c. Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tahun 2000 pada umumnya sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dialami sektor pertambangan dan penggalian sebesar 13,98 persen.

Sebaliknya, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan masih mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,29 persen.

Tabel 4.8
Pertumbuhan Lapangan Usaha di Sumatera Selatan Tahun 1998-2000 (%)

Lapangan Usaha	1998	1999	2000
Pertanian	5,55	2,22	4,86
Pertambangan &Penggalian	0,33	7,99	13,98
Industri Pengolahan	-9,01	-0,10	4,08
Listrik, Gas & Air Bersih	4,83	4,59	4,33
Bangunan	-34,42	2,37	5,78
Perdagangan, Hotel & Restoran	-10,42	7,29	4,97
Pengangkutan & Komunikasi	-8,84	2,56	3,14
Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	-16,16	-8,93	-0,29
Jasa-Jasa	-0,45	2,41	2,24

Sumber : Sumsel Dalam Angka 2000

d. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah Produk Domestik Regional Bruto atas dasar biaya faktor dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Pertumbuhan pendapatan perkapita Sumatera Selatan menunjukkan angka yang meningkat dalam periode 1998-2000. Sedangkan pendapatan perkapita penduduk Sumatera Selatan tahun 2000 atas dasar harga berlaku sebesar 4.998.920 rupiah (dengan migas). Dan pendapatan perkapita tanpa migas sebesar 3.447.726 rupiah.

4.3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar tehadap pembentukan PDRB Kota Palembang sampai dengan tahun 2001 yaitu sebesar Rp 1.181.850,00 atau jika dinyatakan dalam persen sebesar 34,98 persen, untuk lebih jelasnya lihat tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9
PDRB Per Sektor Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan 1993
Tahun 1997-2001 (Jutaan Rupiah)

No	Sektor	1997	1998	1999	2000	2001
1	Pertanian	19.701	20.083	21.438	21.759	22.085
2	Pertambangan &Penggalian	0	0	0	0	0
3	Industri Pengolahan	1.160.633	1.093.760	1.131.430	1.158.676	1.181.850
4	Listrik, Gas & Air Bersih	57.797	62.478	70.960	75.270	81.178
5	Bangunan	196.998	125.874	119.762	126.682	129.738
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	698.916	682.162	761.205	822.208	888.753
7	Pengangkutan & Komunikasi	500.818	335.284	375.859	438.900	486.649
8	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	328.472	259.785	249.940	238.508	241.215
9	Jasa-Jasa	337.768	332.580	327.320	335.975	347.003
PDRB		**3.301.103**	**2.912.006**	**3.057.914**	**3.217.978**	**3.378.471**

Sumber : BPS Kota Palembang

Sedangkan untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan sumbangan sebesar 26,31 persen atau sebesar Rp 888.753,00 , dan untuk sektor pengangkutan dan komunikasi di urutan ketiga besar yang memberikan sumbangan terhadap PDRB Kota Palembang yaitu sebesar Rp 486.649 atau

sebesar 14,40 persen. Sektor pertanian memberikan sumbangan terkecil atas pembentukan PDRB Kota Palembang yaitu sebesar 0,65 persen. Jumlah PDRB Kota Palembang dari tahun 1997 sampai tahun 2001 terus meningkat, dari Rp 3.301.103,00 pada tahun 1997 menjadi Rp 3.378.471,00 pada tahun 2001.

Laju pertumbuhan seluruh sektor ekonomi pada tahun 1996 sampai tahun 2000 di Kota Palembang dapat kita lihat pada tabel 4.10. Pada tahun 1996 seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif. Sedangkan pada tahun 1998 laju pertumbuhan ekonomi menurun tajam. Hal ini sebagai dampak dari krisis ekonomi yang terjadi mulai pertengahan tahun 1997, dimana hampir semua sektor mengalami laju pertumbuhan negatif. Tahun berikutnya menunjukkan adanya perbaikan ekonomi dengan pertumbuhan tidak lagi negatif, yaitu tahun 1999 tumbuh sebesar 4,59 persen. Seluruh sektor ekonomi berhasil bangkit dengan laju pertumbuhan positif, kecuali sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Selanjutnya pada tahun 2000 hanya pada sektor keuangan yang mengalami laju pertumbuhan negatif, sedangkan sektor-sektor yang lain mengalami pertumbuhan yang positif.

Tabel 4.10
Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Kota Palembang
Tahun 1996-2000 (%)

No	Sektor	1996	1997	1998	1999	2000
1	Pertanian	6,23	3,54	1,94	6,75	1,50
2	Pertambangan &Penggalian	0	0	0	0	0
3	Industri Pengolahan	10,24	6,03	-5,76	3,44	2,41
4	Listrik, Gas & Air Bersih	11,07	10,06	7,08	14,66	6,07
5	Bangunan	12,88	7,67	-31,03	-11,86	5,78
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	9,00	5,40	-2,40	11,59	8,01
7	Pengangkutan & Komunikasi	9,72	5,76	-33,05	12,10	16,77
8	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	3,01	3,93	-20,20	-4,64	-4,57
9	Jasa-Jasa	2,76	2,44	-1,54	-1,58	2,64
PDRB		**8,44**	**5,41**	**-11,43**	**4,59**	**5,23**

Sumber : BPS Kota Palembang

Sektor pengangkutan dan komunikasi tahun 2000 mengalami pertumbuhan yang paling besar dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, yaitu sebesar 16,77 persen. Disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,01 persen. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan relatif kecil adalah sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan sebesar -4,57. Sektor pertanian sebesar 1,50 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 2,41 persen.